



Resiliensi Perempuan dalam Konflik Lingkungan Di Indonesia

Mustabsyirotul Ummah Mustofa^{1*}, M. Diva Kafila Raudya¹, Jian Ayume Sundul Langit¹,
Pupoes Biworo¹

¹Department of Political Science, Universitas Padjadjaran, 45363, Jawa Barat-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Jan 31, 2023

Diterima: Jul 03, 2023

Dipublikasi: Jul 11, 2023

KATA KUNCI:

Ekofeminisme; Kendeng; Konflik Lingkungan; Resiliensi Perempuan; Sangihe;

KORESPONDEN:

Mustabsyirotul Ummah Mustofa

Department of Political Science,
Universitas Padjadjaran

Email:

mustabsyirotul.ummah@unpad.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Mustofa, M. U., Raudya, M. D. K., Langit, J. A. S., & Biworo, P. (2023). Resiliensi Perempuan dalam Konflik Lingkungan di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 5(1); 54-64.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.107>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.107>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Environmental conflict is a problem often found in various regions in Indonesia, which occurred in Kendeng and Sangihe. If we look at the impact of environmental conflicts, this threatens the whole community regardless of the gender contained in the object of the dispute. Even so, environmental conflicts are often identified as something "masculine". This study seeks to describe how women's resilience in environmental conflicts that occurred in Kendeng and Sangihe. Besides that, this research also seeks to see how the various narratives of ecofeminism relate to the resilience practices carried out by women in the context of environmental conflicts. The researcher uses a qualitative research type with the unit of analysis of two Watchdoc documentaries entitled "Samin vs Semen" and "Sangihe Melawan" which will be analyzed using content analysis techniques. The results of the study show that the role of women in the movement against environmental conflict in both Kendeng and Sangihe is determined by a sense of ownership of the environment or nature which is a means of fulfilling the material needs of the local community. Another research result is that there are differences in the narratives of ecofeminism contained in the two movements, with the movement in Kendeng which is more towards spiritual ecofeminism and the movement in Sangihe which is more towards transformative ecofeminism. Although there are differences in terms of ecofeminism narratives, there are no significant differences in terms of resilience practices carried out by women in both Kendeng and Sangihe.

Abstrak Konflik lingkungan menjadi persoalan yang sering dijumpai diberbagai wilayah di Indonesia, yang diantaranya terjadi di Kendeng dan Sangihe. Jika melihat dampak dari konflik lingkungan, tentunya hal tersebut mengancam seluruh masyarakat tanpa memandang suatu gender yang terdapat dalam objek sengketa tersebut. Meski begitu, konflik lingkungan kerap diidentikan sebagai sesuatu yang "maskulin". Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berupaya mendeskripsikan bagaimana resiliensi perempuan dalam konflik lingkungan yang terjadi di Kendeng dan Sangihe. Disamping itu, penelitian ini juga berupaya melihat bagaimana kaitan antara narasi ekofeminisme yang beraneka ragam dengan praktik resiliensi yang dilakukan oleh perempuan dalam konteks konflik lingkungan. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan unit analisis dua film dokumenter milik Watchdoc dengan judul "Samin vs Semen" dan "Sangihe Melawan" yang akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam gerakan perlawanan terhadap konflik lingkungan baik di Kendeng dan Sangihe dideterminasi oleh rasa kepemilikan akan lingkungan atau alam yang menjadi sarana pemenuhan kebutuhan material masyarakat setempat. Hasil penelitian lainnya ialah terdapat perbedaan narasi ekofeminisme yang terdapat dalam kedua gerakan tersebut, dengan gerakan di Kendeng yang lebih mengarah pada ekofeminisme spiritual dan gerakan di Sangihe yang lebih mengarah pada ekofeminisme transformatif. Meski terdapat perbedaan dalam hal narasi ekofeminisme, tetapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal praktik resiliensi yang dilakukan oleh perempuan baik di Kendeng maupun Sangihe.

TENTANG PENULIS:

Mustabsyirotul Ummah Mustofa, menyelesaikan studi S-2 di Magister Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, saat ini berkerja sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Padjadjaran.

M. Diva Kafila Raudya, merupakan mahasiswa S-1 di Prodi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan minat penelitian di bidang diskursus dan kebudayaan.

Jian Ayune Sundul Langit, merupakan mahasiswa S-1 di Prodi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan peminatan penelitian pada isu perempuan dan gender.

Pupoes Biworo, merupakan mahasiswa S-1 di Prodi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan peminatan penelitian pada diskursus politik.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara agraris, sektor pertanian menjadi penopang ekonomi terbesar bagi Indonesia dengan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 2,25 kuadriliun atau 13,28% pada tahun 2021 lalu (Kusnandar, 2022). Besaran angka kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sekilas tampak cukup memberikan kesan yang baik. Tetapi, di balik besaran kontribusi sektor pertanian terhadap PDB tersebut ada beragam persoalan dan yang paling umum dijumpai adalah konflik lingkungan. Laporan yang dirilis oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat pada tahun 2021 lalu setidaknya terjadi 207 konflik agraria yang tersebar di 32 provinsi dengan luas lahan konflik mencapai lebih dari 500.000 hektar (Herman, 2022).

Konflik lingkungan kerap kali disematkan sebagai sesuatu yang ‘maskulin’. Dalam situasi konflik lingkungan, laki-laki kerap memiliki kekuatan yang lebih besar dalam konteks pengambilan keputusan, sedangkan perempuan lebih diarahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hanya pendukung (Stoddart & Tindall, 2011). Diskursus maskulinitas yang hegemonik dalam konflik lingkungan membuat pembacaan terhadap peran perempuan dalam konflik lingkungan menjadi luput. Padahal cukup banyak literatur yang menunjukkan bahwasanya perempuan memiliki perhatian yang lebih besar ketimbang laki-laki terhadap lingkungan (Blake et al., 1997; Dietz et al., 2002; Tindall et al., 2003). Tidak hanya dalam bentuk perhatian, dalam konteks praksis pun perempuan memainkan peran yang cukup penting dalam melindungi dan melestarikan lingkungan (Jenkins & Rondón, 2015; Saikia, 2021). Dalam konteks di Indonesia, secara empiris perempuan memainkan peran yang cukup krusial dalam konflik lingkungan yang terjadi di Mollo, Wadas, Kendeng, Kinipan, Komodo, dan Sangihe (Mustofa et al., 2022).

Perhatian serta peran perempuan yang cukup krusial dalam konflik lingkungan tidak dapat dilepaskan dari konteks dampak yang dihasilkan dari konflik lingkungan, pembangunan, serta praktik ekstraktivisme sumber daya alam yang kerap merugikan perempuan. Ester Boserup et al., (Boserup et al., 2007), dalam karyanya mencatat bahwa pembangunan yang terjadi kerap memberikan kerugian bagi perempuan karena memberikan pengaruh terhadap transformasi pembagian kerja tradisional yang masih mengadopsi bentuk-bentuk kesetaraan menjadi pembagian kerja baru yang merugikan perempuan. Vandana Shiva (2005) lebih lanjut menjelaskan bahwa globalisme menurut pandangan kapitalis patriarki semata menjadi tujuan kapitalisme global untuk menguasai sumber-sumber alam dan pasar dunia, di mana pembangunan yang merampas tanah akan memutus ikatan batin antara masyarakat dan tanah. Solo (2012) turut mempertegas pandangan bahwa perempuan akan menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dalam era globalisasi saat ini di mana struktur agraria bersifat kapitalistik. Pandangan tersebut sesuai dengan kondisi yang ditemukan oleh Whitehead di mana lebih dari satu persen penduduk miskin di dunia berasal dari kelompok perempuan (Wulan, 2007). Shiva dan Mies menyebut hal tersebut sebagai kolonisasi kulit putih, di mana bentuk-bentuk ketergantungan antara dunia ketiga terhadap negara pemodal global teradopsi pula ke dalam relasi manusia dan alam, laki-laki dan perempuan, serta perkotaan dan pedesaan (Shiva & Mies, 2005)

Dalam konteks Indonesia, Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat menyatakan bahwa dalam konflik lingkungan, terutama yang menyangkut dengan sumber daya alam, perempuan kerap kehilangan perannya sebagai pemegang local knowledge atas lingkungannya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat batiniah maupun ekonomis, seperti melakukan ritual-ritual penghormatan atas alam, meramu obat-obatan herbal, dan bercocok tanam di ladang menjadi terancam akibat adanya perampasan lahan. Perampasan ruang hidup tersebut tentunya memberikan dampak yang lebih jauh, bahkan mampu memunculkan fenomena kemiskinan, perdagangan perempuan, proletarianisasi seperti bekerja di tanah orang, hingga lenyapnya relasi sosial yang aman dan damai (Wardah, 2022).

Dengan adanya perhatian serta peran yang krusial perempuan dalam konflik lingkungan, yang telah terbukti secara empiris di Indonesia, penelitian ini berupaya meneliti lebih lanjut bagaimana resiliensi perempuan dalam konflik lingkungan yang terjadi di Indonesia utamanya yang terjadi di Kendeng dan Sangihe. Resiliensi secara definitif merupakan kemampuan suatu komunitas atau kelompok masyarakat dalam upayanya untuk mengatasi gangguan dan tekanan eksternal yang disebabkan karena perubahan politik, sosial, dan lingkungan (Adger, 2000).

Penelitian mengenai resiliensi perempuan dalam konflik lingkungan menjadi menarik dikarenakan perempuan memiliki narasi atau pemahamannya sendiri mengenai lingkungan yang dikenal dengan sebutan ekofeminisme. Dengan begitu, secara rinci penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh narasi ekofeminisme yang ada dalam gerakan perlawanan terhadap konflik lingkungan di Kendeng dan Sangihe terhadap resiliensi yang dilakukan. Pemilihan lokasi yang akan diteliti dalam penelitian ini didasarkan pada keterbatasan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari dua film dokumenter yang menyajikan konteks peran perempuan dalam gerakan perlawanan terhadap konflik lingkungan di Indonesia, utamanya di daerah Kendeng dan Sangihe.

LANDASAN TEORITIK

Kedekatan hubungan antara perempuan dan alam hampir terjadi di seluruh kebudayaan yang ada di dunia, baik kedekatan secara praktis seperti bekerja di ladang, atau kedekatan secara emosional. Kedekatan hubungan antara perempuan dan alam, oleh para pemikir feminis disebut sebagai ekofeminisme. Ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya (Megawangi, 1999). Istilah ekofeminisme pertama kali muncul pada tahun 1974 dalam karya *Le Feminisme ou la mort* milik Françoise d'Eaubonne. Dalam karyanya tersebut, ia mengatakan bahwa ada keterkaitan antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam (Tong, 2009). Lebih lanjut, Warren (Warren, 1994) memberikan hipotesis fundamental mengenai ekofeminisme: (1) ada hubungan yang signifikan antara penindasan perempuan dan alam; (2) untuk memahami secara memadai tentang penindasan terhadap perempuan dan alam, diperlukan pemahaman tentang alam, dan dalam konteks ini; (3) feminis harus memasukkan perspektif ekologi ke dalam teori dan praktik mereka; dan (4) penyelesaian masalah ekologi haruslah memasukkan perspektif feminis.

Ekofeminisme kemudian berkembang setidaknya menjadi empat aliran: (1) ekofeminisme alam; (2) ekofeminisme spiritual; (3) ekofeminisme sosial; dan (4) ekofeminisme transformatif. Perkembangan aliran tersebut didasari atas perbedaan asumsi terhadap hubungan antara perempuan dan alam serta akar feminismenya. Ekofeminis alam memandang hubungan antara perempuan dengan alam sebagai suatu hubungan yang dihasilkan dari pengalaman aktual yang bersifat biologis dan psikologis. Sedangkan ekofeminisme spiritual, melihat hubungan yang terjalin antara perempuan dan alam sebagai suatu peristiwa transendental, yang disimbolkan dalam bentuk-bentuk ritual penghormatan terhadap dewi-dewi. Kedua aliran ini berasal dari akar feminisme yang sama, yaitu feminisme radikal kultural.

Bertolakbelakang dengan kedua pandangan tersebut, ekofeminis sosial tidak memberikan penekanan untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan antara perempuan

dan alam. Ekofeminis sosial lebih berfokus untuk menjelaskan implikasi yang dihasilkan ketika perempuan memutuskan hubungan yang dikonstruksikan secara sosial dan dipaksakan secara ideologis terhadap alam. Implikasinya adalah langgengnya bentuk-bentuk dominasi serta opresi dari laki-laki terhadap perempuan dan juga opresi alam oleh kebudayaan. Terakhir, ekofeminis transformatif yang mencoba mencari gambaran besar mengenai keterhubungan antara penindasan terhadap perempuan dan alam dengan mengeksplisitkan hubungan antar sistem yang menindas. Aliran ekofeminis transformatif ini menolak logika dominasi yang dibangun baik terhadap perempuan maupun alam dengan mengedepankan nilai-nilai tradisional "feminin" yang mengidentifikasi manusia sebagai entitas yang saling terjalin hubungan dengan yang lainnya. Aliran ini juga turut mendukung penggunaan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menuntaskan persoalan ekologi (Tong, 2009).

Kaitan antara perempuan dan alam, membuat perempuan memiliki peran yang cukup signifikan dalam konflik lingkungan terutama kemampuan untuk pemulihan pasca situasi konflik atau yang biasa disebut sebagai resiliensi. Secara definitif, resiliensi mengacu pada kemampuan untuk bangkit ke kondisi semula di tengah adanya hambatan yang signifikan (Lenette et al., 2013). Para ekologis seperti Adger (2000) mendefinisikan resiliensi dengan pendekatan sosial dan lingkungan, yang menyatakan bahwa resiliensi merupakan kemampuan suatu kelompok atau masyarakat untuk mengatasi gangguan dan tekanan eksternal yang disebabkan karena perubahan politik, sosial, dan lingkungan. Pendekatan semacam ini berkaitan dengan situasi seperti bencana alam dan perubahan iklim.

Penelitian ini tidak melihat resiliensi dengan kerangka tersebut, melainkan melihat kaitan antara relasi dengan perlawanan dalam konflik, yang mana resiliensi akan difokuskan pada bagaimana individu atau komunitas mengatasi tekanan dan kesulitan yang berkelanjutan, serta bagaimana proses mobilisasi sumber daya. Hal ini sejalan dengan paradigma ekofeminisme dimana resiliensi terhadap konflik dan upaya perlawanan struktur merupakan bagian inheren dalam pandangan tersebut.

Pemahaman mengenai resiliensi dapat dipandang secara politis maupun apolitis. Resiliensi kerap kali dilihat secara apolitis tatkala digunakan untuk mempromosikan strategi ekonomi dan sosial oleh pembuat kebijakan berhaluan neoliberal dengan mengalihkan tanggung jawab mengenai kesejahteraan dari yang semula merupakan tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab individu atau masyarakat (Diprose, 2014). Pemahaman resiliensi secara politis akan digunakan dalam penelitian ini karena dapat membantu memahami bagaimana suara dan hak perempuan yang terpinggirkan dalam konflik lingkungan, dalam kasus ini konflik lingkungan yang terjadi di Kendeng dan Sangihe.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan, maka studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diadopsi karena pendekatan jenis ini biasa digunakan dalam rangka meneliti suatu fenomena secara mendalam (Moleong, 2016). Selain itu, metode penelitian kualitatif dipilih karena metode ini biasa digunakan dalam upaya mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna dari suatu fenomena sosial dengan melakukan penggalian data baik melalui sumber tertulis maupun yang bersifat verbal (Taylor et al., 2015).

Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dua film dokumenter yang diproduksi oleh Watchdoc Documentary dengan judul "Samin vs Semen" (2015) dan "Sangihe Melawan" (2022). Dua film ini dipilih sebagai sumber data primer dalam penelitian ini karena mengandung muatan berupa peran perempuan dalam gerakan perlawanan terhadap konflik lingkungan. Kedua film tersebut akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten dengan menelusuri konsep kunci mengenai resiliensi perempuan dalam konflik lingkungan yaitu: *determination to fight, commitment to collective action and resistance, dan tenacity in campaigning against land acquisition* (Jenkins & Rondón, 2015). Sedangkan data

sekunder guna menunjang penelitian ini diambil dari studi kepustakaan untuk meninjau serta mengeksplorasi kajian, literatur, dan dokumentasi terdahulu mengenai resiliensi perempuan dalam konflik lingkungan yang terjadi di Indonesia.

Resiliensi berdasarkan perspektif Ekofeminisme memiliki keterkaitan satu sama lain. Konflik sebenarnya tidak mengenal gender, namun respon manusia terhadap konflik tidak terlepas dari konstruksi sosial yang terkait dengan gender, seperti; kesadaran subjektif, akumulasi pengetahuan dan praktik sehari-hari. Oleh Holling (1973) dikatakan bahwa resiliensi sebagai kemampuan sistem dalam menyerap perubahan atau gangguan yang dihadapi, serta menjaga komponen atau variabel-variabel penyusun tetap terjaga atau tidak berubah. Dapat diartikan bahwa resiliensi ini dipahami sebagai kemampuan manusia dan lingkungannya untuk beradaptasi dengan melakukan usaha. Dalam artikel ini resiliensi perempuan dilihat sebagai kemampuan dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan modal untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi. Perempuan yang menjalankan pekerjaannya dalam sistem patriarki dan pekerjaan mereka terkoneksi dengan sistem publik yang beroperasi dengan sistem kapitalis. Dan kedua kekuatan inilah yang menggunakan perempuan dan alam untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu resiliensi perempuan dapat dilihat dari perspektif ekofeminisme, karena ekofeminisme memberikan perhatian pada kedua konsep yaitu ketidakadilan gender dan lingkungan/alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan dan Tekad Perjuangan Melawan Ketidakadilan

Dalam film dokumenter “samin vs semen” dan “sangihe melawan” terdapat persamaan para perempuan yang turut terlibat dalam aktivisme melawan tambang di kedua daerah tersebut. Rasa kepemilikan atas tanah dan alam yang selama ini menopang kebutuhan material masyarakat sekitar menjadi faktor penentu bagi mereka untuk berjuang melawan tambang. Hal itu dibuktikan dengan artikulasi mereka yang menyatakan bahwa alam mampu mencukupi kebutuhan material mereka sehari-hari.

“tanah pertanian itu tidak boleh dijual, tapi untuk warisan ke anak cucu. kalau dijual, untuk nafkahnya bagaimana?” (perempuan samin)

“disana mungkin kami memiliki dua atau tiga hektar, dibanding dengan pembayaran nanti ya tidak sebandinglah dengan penghasilan saya dan suami saya” (elbi pieter, sangihe)

“dari kebutuhan hidup 2 juta rupiah, yang 1,2 juta rupiah adalah karunia alam karena air gratis” (guntari, kendeng)

“tidak ada yang salah ketika kami mau menyatakan hak dan pendapat pilihan masyarakat sangihe untuk tidak mau hancur ruang hidupnya karena hanya tambang emas sangihe” (jull takaliuang, sangihe)

Perusahaan tambang yang memperlakukan tanah dan alam sebagai komoditi untuk ditukarkan dengan uang bertentangan dengan hakikat tanah dan alam itu sendiri. Menurut Polanyi (Polanyi, 2001) ketika tanah menjadi fictitious commodity (istilah untuk tanah yang dijadikan komoditi) maka relasi-relasi sosial yang terikat pada tanah dan alam akan terguncang dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat sekitar. Sebagai syarat hidup, memasukkan tanah ke dalam mekanisme pasar menurut polanyi akan sekaligus turut membuat pengaturan hidup masyarakat diserahkan pada mekanisme pasar, dan hal ini yang akan sendirinya menimbulkan gejala perlawanan.

Rencana pembangunan pabrik semen yang dimulai pada tahun 2005 oleh PT. Semen Gresik dengan mencakup empat kecamatan dan total luas lahan 1.350 hektar tersebut gagal

karena masyarakat sekitar menolak adanya kegiatan eksplorasi di kawasan Kendeng. Masyarakat menolak penambangan semen dikarenakan mereka beranggapan akan merusak cekungan air tanah di daerah tersebut, yang dimana sebagian besar profesi warga sana merupakan petani yang tentunya pasti membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pembangunan pabrik ini juga dapat membatasi ruang hidup warga dan menyebabkan permasalahan sosial dan alam di masa yang akan datang. Penolakan didukung juga oleh warga Sedulur Sikep yang menganut kepercayaan Samin, mereka tinggal di kawasan Pegunungan Kendeng. Hadirnya rencana pembangunan pabrik semen ini tentunya tidak lepas dari kepentingan pemerintah setempat untuk mendapatkan investasi. Dari investasi tersebut berdalih untuk menumbuhkan perekonomian dan menyerap ribuan tenaga kerja.

Melawan menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat Sangihe karena adanya potensi-potensi kerusakan alam yang luar biasa apabila tambang emas tetap berjalan. Secara sederhana ancaman yang ditimbulkan oleh tambang emas tersebut bisa kita pahami melalui metode penambangan yang digunakan, yakni menggunakan metode tambang terbuka yang diawali dengan membuka lahan, mengangkat, atau memusnahkan vegetasi yang ada, yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian. Hilangnya kawasan hutan yang berada di wilayah perbukitan atau dengan kemiringan yang curam berpotensi mengakibatkan bencana. Apabila turun hujan maka akan terjadi longsor yang akan mengakibatkan sedimentasi di wilayah perairan, sedimentasi itulah yang kemudian akan menutupi karang laut sehingga menyebabkan ekosistem laut dan ikan-ikan akan bergerak menjauh ke tengah laut. Matinya ekosistem terumbu karang dapat menyebabkan abrasi yang dapat mengancam 80 persen dari penduduk di Sangihe yang bermukim di kawasan pesisir. Rangkaian kejadian tersebut akan berdampak buruk bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut.

Keanekaragaman flora dan fauna juga turut terancam dengan kehadiran tambang emas di Sangihe. Salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan izin tambang emas adalah gunung Sahendaruman, dimana kawasan ini merupakan hulu dari tujuh puluh sungai dan anak sungai yang mengalir ketujuh puluh desa oleh karena itu kawasan tersebut oleh pemerintah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Selain itu kawasan ini juga menjadi tempat tinggal bagi hewan endemik langka seperti burung niu. Dengan aktivitas tambang yang bercorak eksploitatif maka berbagai kehidupan yang ada di dalam kawasan Gunung Sahendaruman berpotensi untuk menghilang dan lenyap.

Komitmen Aksi dan Mobilisasi Kaum Perempuan

Perjuangan aksi demonstrasi dari perempuan pada kedua film dokumenter tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Samin maupun Sangihe sudah sangat terancam. Salah satu bentuk ancaman dari aktivitas tambang adalah terjadinya krisis pangan. seperti yang disampaikan oleh Guntari “daripada krisis pangan, mending krisis semen”. Bentuk perjuangan masyarakat dalam menghadapi konflik lingkungan pada kedua dokumenter tersebut relatif sama, mereka sama-sama memperjuangkan tanah hunian beserta lingkungan di daerahnya masing-masing. Namun aksi masyarakat banyak mengalami ancaman kekerasan dan kriminalisasi. Konteks politik juga kerap diserukan manakala negara dianggap tidak hadir ditengah masyarakat dan terkesan berpihak kepada swasta.

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat yang memperjuangkan ruang hidupnya di Kendeng, tentunya membuat masyarakat menjadi trauma. Namun, perjuangan masyarakat kendeng tidak pernah berhenti. mereka tetap bersikeras menolak aktivitas tambang di kawasan Kendeng. Beberapa hal dilakukan oleh masyarakat kendeng agar tetap semangat. misalnya dengan berkumpul bersama sembari menyanyikan yel-yel “*kita pasti menang! pasti menang! pasti menang!*” (*perempuan, samin*).

Selain itu, masyarakat Kendeng juga sempat berkumpul di balai warga untuk melakukan sosialisasi sembari saling menyemangati. dalam pertemuan di balai warga, terucap kalimat

“jangan patah semangat, sedikit lagi” (joko prianto, kendeng). Dalam suatu wawancara, tokoh perempuan Kendeng tetap memberikan pernyataan optimis untuk terus berjuang melawan tambang, *“meski perjalanan berat, jika kita bersatu kita terbukti bisa mengalahkan semen gresik” (Guntari, kendeng).*

Sementara itu dalam film dokumenter yang berjudul *Sangihe Melawan*, peran perempuan dalam konteks perjuangan untuk mempertahankan alam sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian di Sangihe tidak disorot secara spesifik. Hal ini bisa kita lihat dalam pembagian tugas gender yang digambarkan dalam film dimana tugas domestik tidak selalu dikerjakan oleh perempuan. Bekerja untuk mencari uang juga dilakukan oleh perempuan, mulai dari berkebun hingga berjualan ikan di pelabuhan. Hal ini juga menunjukkan bahwa krisis ekologi yang terjadi di Sangihe tidak berat sebelah terhadap salah satu gender. Namun dalam beberapa aksi yang terjadi ditunjukkan bahwa perempuan berperan menjadi inisiator, seperti gerakan *Save Sangihe Island*. Jull Takaliuang merupakan perempuan yang menjadi inisiator dari gerakan *Save Sangihe Island*, beliau menjelaskan bahwa masyarakat hanya dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu melawan dengan kekuatan masyarakat sendiri atau kehidupannya terancam oleh kehadiran tambang emas, kemudian beliau menambahkan bahwa perlu adanya panduan atau edukasi menimbang potensi konflik horizontal yang akan terjadi ketika perjuangan tidak diarahkan ke jalur legal formal.

Aksi demonstrasi juga dilakukan untuk menyuarakan apa yang menjadi ketakutan masyarakat Sangihe dengan kehadiran tambang emas, salah satu momen yang coba dimanfaatkan oleh masyarakat adalah akhir Januari 2022 dimana Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar dijadwalkan menghadiri sidang majelis persekutuan gereja-gereja di Sangihe. Meskipun pada akhirnya gagal karena Luhut tidak jadi datang dikarenakan adanya kabar mengenai aksi damai yang akan dilakukan oleh masyarakat Sangihe. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan jalur legal formal dengan mengajukan gugatan pertama disampaikan masyarakat kepada PTUN Jakarta yang kemudian ditolak. Masyarakat juga mengajukan gugatan ke PTUN Manado yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan, dan memutuskan bahwa PT. TMS harus menghentikan seluruh kegiatan pertambangan di pulau Sangihe.

Kegigihan Perempuan dalam Mengkampanyekan Perlawanan

Perlawanan yang dilakukan terhadap aktivitas tambang dilakukan oleh berbagai cara mulai dari melakukan aksi langsung, mengajukan gugatan ke pengadilan, melakukan agenda penyadaran dari kampung ke kampung, hingga memasang spanduk sebagai bentuk kampanye. *“aku berjalan ke setiap desa untuk mengingatkan agar bisa mempertahankan tanahnya masing-masing” (Guntari, Kendeng).*

Aksi langsung yang dilakukan oleh perempuan Kendeng adalah dengan memblokir jalan sehingga alat-alat operasionalisasi tambang tidak dapat masuk ke kawasan Kendeng, sembari membawa poster tuntutan dan menutup mulut dengan plester. Kaum perempuan melakukan gerakan pemasangan kaki di depan istana merdeka, gerakan lainnya dilakukan pada tahun 2014 para ibu-ibu di kawasan kendeng menginap di tenda selama lebih dari 160 hari sebagai bentuk penolakan pembangunan pabrik semen yang dilakukan PT. Semen Gresik. Gerakan tersebut dilakukan dengan cara pemblokiran jalan menuju pabrik dengan upaya pemberhentian aktivitas pertambangan sampai putusan peradilan yang tetap. Setelah gerakan tersebut mulai bertambah kaum perempuan yang mengikuti gerakan tersebut. kaum perempuan tersebut berupaya menjaga cekungan air tanah (cat) yang sampai saat ini memberikan kehidupan bagi masyarakat kendeng.

Sedangkan di Sangihe, aksi dilakukan memasang spanduk di beberapa titik yang bermuatan penolakan aktivitas tambang emas di Sangihe. Kaum perempuan juga membuka petisi guna mendapatkan dukungan dari masyarakat terhadap gerakan #savesangihe. Selain menempuh jalur hukum, perlawanan dilakukan dengan melakukan aksi langsung yang

menghadang masuknya alat berat milik PT. TMS. Aksi ini tak ayal berdampak pada kekerasan fisik yang dirasakan oleh kaum perempuan. Meski begitu, tidak sedikitpun para Ibu dan kaum perempuan yang melakukan perlawanan mundur untuk memperjuangkan tanah air mereka. Lebih dari itu, kegigihan perlawanan yang mereka lakukan menginspirasi banyak gerakan sosial dan lingkungan lainnya untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan semangat perlawanan dan resiliensi perempuan dalam menghadapi konflik lingkungan.

Refleksi Ekofeminisme

Keterlibatan perempuan dalam gerakan lingkungan disebabkan karena adanya hubungan antara perempuan dan alam. Hubungan antara perempuan dan alam menurut Warren dalam (Tong, 2009) yang menyatakan bahwa dalam konteks hubungannya dengan alam, perempuan dianggap mengalami proses “naturalisasi” dan sebaliknya alam dianggap mengalami proses “feminisasi”. Perempuan mengalami proses “naturalisasi” ketika perempuan dijelaskan dengan terma-terma hewan seperti sapi, rubah, ayam, kucing, dan lain sebagainya. Sedangkan alam dianggap mengalami proses “feminisasi” ketika alam mengalami penguasaan, pemerkosaan, penetrasi, dan subordinasi. Hal ini menunjukkan adanya kedekatan yang bersifat batiniyah antara perempuan dan alam. Ketika alam mengalami ekstraksi, perempuan seolah-olah mampu merasakan apa yang terjadi pada alam. Ditambah dengan objektifikasi perempuan dan alam yang terjadi sepanjang sejarah perkembangan masyarakat, di mana muncul anggapan bahwa perempuan hanya sebatas objek untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, begitu juga dengan alam, membuat adanya hubungan yang emosional antara perempuan dengan alam. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ortner dalam (Susilo, 2008) yang menjelaskan bahwa sulit bagi perempuan untuk memutus hubungan dengan alam.

Ekofeminisme spiritual tercermin dalam perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Samin di Kendeng. Mereka mempercayakan bahwa sumber bumi yang paling dibutuhkan adalah air, karena air sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari para perempuan samin, maka dari itu mereka sangat menjaga kelestarian lingkungan untuk dapat melindungi sumber daya alam terutama air. Sementara itu, ekofeminisme transformatif melekat dalam gerakan perjuangan di Sangihe.

Aliran ekofeminis transformatif ini menolak logika dominasi yang dibangun baik terhadap perempuan maupun alam dengan mengedepankan nilai-nilai tradisional “feminin” yang mengidentifikasi manusia sebagai entitas yang saling terjalin hubungan dengan yang lainnya. Aliran ini juga turut mendukung penggunaan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menuntaskan persoalan ekologi. Corak perjuangan perempuan di Sangihe dengan memelopori *Save Sangihe Island* baik dilakukan dengan menempuh jalur legal formal maupun dukungan secara online menjadi tapak struktural resiliensi perempuan Sangihe yang transformatif.

Masyarakat menggantungkan hidupnya pada hasil alam, ketika alam itu rusak maka muncul urgensi untuk melindungi alam tersebut. Dalam perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Sangihe menunjukkan pola yang beda dengan apa yang terjadi di masyarakat Samin di Kendeng. Berbeda dengan masyarakat Samin, relasi yang terjalin antara alam dan masyarakat Sangihe tidak dibangun di atas nilai-nilai spiritual. Hubungan tersebut dibangun di atas urgensi yang bersifat pragmatis (pemuahan kebutuhan hidup), meskipun begitu masyarakat terus menyeruakan dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan yang dilakukan. Meskipun tidak ditunjukkan adanya nilai-nilai tradisional “feminin” secara eksplisit baik dalam film dokumenter maupun gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Sangihe, namun upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat Sangihe sudah menunjukkan adanya penolakan terhadap logika dominasi yang dibangun baik terhadap perempuan maupun alam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan memiliki peran penting bagi lingkungannya. Perjuangan perempuan untuk lingkungannya ini dikarenakan mereka sebagai pihak yang paling

terdampak dalam kontestasi sumber daya alam sekaligus menjadi pihak yang juga tidak berdaya. Dalam proses disposisi lahan ini perempuan setidaknya akan mengalami empat hal berikut: hilangnya hak tenurial, terbentuknya pembagian kerja gender yang baru, feminisasi kerja-kerja perempuan, dan hilangnya sumber-sumber pendapatan perempuan. Sadar akan hal tersebut maka perempuan melakukan gerakan kolektif setiap hari yang datang dari seperangkat sosial dan praktik budaya (*eventually*). Perbedaan aliran ekofeminisme ini tetap saja bermuara pada kesimpulan bahwa perempuan tidak dapat jauh-jauh dari alam, karena hakikatnya lingkungan/alam sering di indetikkan dengan '*mother nature*'. Dengan bekal aksi kolektif perempuan-perempuan ini dapat menjadi aktor kunci dalam resolusi konflik lingkungan yang sedang terjadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua film dokumenter tersebut, peran perempuan dalam gerakan perlawanan terhadap konflik lingkungan dideterminasi oleh rasa memiliki akan tanah dan alam yang telah menyediakan kebutuhan material bagi masyarakat sekitar. Hal itu ditunjukkan oleh artikulasi-artikulasi mengenai ancaman krisis pangan, ekonomi, dan ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang dalam kedua dokumenter tersebut. Meski di tengah ketidakberpihakan negara terhadap masyarakat Samin dan Sangihe yang dibuktikan dengan munculnya aparaturnegara dalam mengawal aktivitas tambang yang disertai kekerasan, cukup banyak peran yang dilakukan oleh perempuan dalam gerakan melawan konflik lingkungan. Adapun peran perempuan dalam konteks ini yaitu mengorganisir dan melakukan penguatan wacana akan ancaman krisis oleh aktivitas tambang, aksi langsung, menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, hingga melakukan berbagai kegiatan kampanye.

Meskipun kedua gerakan perlawanan terhadap konflik lingkungan di Kendeng dan Sangihe dilakukan dengan metode yang hampir serupa, serta sama-sama dideterminasi oleh rasa kepemilikan atas alam, namun berdasarkan hasil analisis terdapat perbedaan mengenai narasi ekofeminisme yang terdapat di Samin dan Sangihe. Perjuangan yang dilakukan oleh perempuan Samin di Kendeng lebih dilandasi oleh nilai-nilai kebudayaan dan spiritual, sehingga narasi ekofeminisme yang terdapat pada masyarakat Samin lebih mengarah pada kategori ekofeminisme spiritual, dengan kepercayaan mereka bahwa mempertahankan lingkungan atau alam adalah bentuk kepercayaan paling fundamental dalam masyarakat Samin. Sedangkan dalam konteks perjuangan yang dilakukan oleh perempuan di Sangihe, aspek nilai-nilai spiritual dan kultural tidak terlalu diusung dalam agenda melawan aktivitas tambang. Agenda yang diusung oleh perempuan di Sangihe lebih kepada gambaran besar mengenai ketimpangan akibat konflik agraria. Dengan begitu, gerakan perempuan di Sangihe lebih mengarah pada narasi ekofeminisme transformatif. Narasi ini didukung pula oleh aktivitas maksimalisasi penggunaan perkembangan teknologi dalam rangka mewujudkan suatu perubahan sosial yang dilakukan oleh perempuan di Sangihe dalam aktivismenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? *Progress in Human Geography*, 24(3), 347–364. <https://doi.org/10.1191/030913200701540465>
- Blake, D. E., Guppy, N., & Urmetzer, P. (1997). Being Green in BC: Public Attitudes Towards Environmental Issues. *BC Studies* 216: Winter 2022/23, 41–61. <https://doi.org/10.14288/bcs.v0i112.1667>
- Boserup, E., Kanji, N., Tan, S. F., & Toulmin, C. (2007). *Woman's Role in Economic Development*. London: Routledge.

- Dietz, T., Kalof, L., & Stern, P. C. (2002). Gender, Values, and Environmentalism. *Social Science Quarterly*, 83(1), 353–364. <http://www.jstor.org/stable/42956291>
- Diprose, K. (2014). esilience is futile: The cultivation of resilience is not an answer to austerity and poverty. *Soundings: A journal of politics and culture* 58, 44-56. <https://www.muse.jhu.edu/article/565757>
- Herman. (2022). *KPA Catat 207 Konflik Agraria Sepanjang 2021*. Retrieve from beritasatu.com. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021>
- Holling, C. S. (1973). Resilience and Stability of Ecological System. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4, 1-23. <https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000245>
- Jenkins, K., & Rondón, G. (2015). ‘Eventually the mine will come’: women anti-mining activists’ everyday resilience in opposing resource extraction in the Andes. *Gender and Development*, 23(3), 415–431. <https://doi.org/10.1080/13552074.2015.1095560>
- Kusnandar, V. B. (2022, February 15). *Ini Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Ekonomi RI Tahun 2021*. Retrieve from Katadata.com. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/15/ini-kontribusi-sektor-pertanian-terhadap-ekonomi-ri-tahun-2021>
- Lenette, C., Brough, M., & Cox, L. (2013). Everyday resilience: Narratives of single refugee women with children. *Qualitative Social Work*, 12(5), 637–653. <https://doi.org/10.1177/1473325012449684>
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mustofa, M. U., Raudya, M. D. K., Nurdini, F. M., & Sulaeman, K. M. (2022). *The Indonesian Journal of Politics and Policy Radikalisasi Grassroots Movements Dalam Politik Ekologi di Indonesia Pasca Reformasi*. 4(1). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP>
- Polanyi, K. (2001). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (Paperback). Beacon Press. www.beacon.org
- Saikia, U. (2021). *Role Of Women In Environmental Movement In India*. 20(6), 2473–2478. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.06.228>
- Shiva, V., & Mies, M. (2005). *Ekofeminisme*. Yogyakarta: IRE Press.
- Solo, T. L. (2012). Agenda Perempuan dalam Gerakan Petani. *Muwazah*, 2(1), 205-2014. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v2i1.18>
- Stoddart, M. C. J., & Tindall, D. B. (2011). Ecofeminism, hegemonic masculinity, and environmental movement participation in British Columbia, Canada, 1998-2007: “women always clean up the mess.” *Sociological Spectrum*, 31(3), 342–368. <https://doi.org/10.1080/02732173.2011.557065>

Susilo, R. K. D. (2008). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource* (4th ed.). New Jersey: Wiley.

Tindall, D. B., Davies, S., & Mauboulès, Cé. (2003). Activism and conservation behavior in an environmental movement: The contradictory effects of gender. *Society and Natural Resources*, 16(10), 909–932. <https://doi.org/10.1080/716100620>

Tong, R. P. (2009). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (Third Edition). Colorado: Westview Press.

Wardah, F. (2022). *Perempuan Korban Paling Rentan Akibat Konflik Sumber Daya Alam*. <https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-korban-paling-rentan-akibat-konflik-sumber-daya-alam/6675986.html>

Warren, K. J. (1994). *Ecological Feminism Perspective*. London: Routledge.

Wulan, T. R. (2007). Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1), 105-130. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i1.5935>